

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang di dalamnya meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penetausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Keuangan Daerah merupakan segala bentuk hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah serta berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Pengelolaan Keuangan Daerah diatur dalam PP 12 tahun 2019 mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005.

Pada era saat ini kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah sangat diperlukan untuk dapat memberikan gambaran dan karakteristik mengenai laporan keuangan tersebut apakah laporan keuangan pemerintah daerah sudah sesuai dengan aturan – aturan yang ada, serta kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia merupakan salah satu cara agar kita mengetahui kinerja aparat pemerintah dapat dipertanggung jawabkan.

Laporan keuangan pemerintah daerah disusun berdasarkan APBD yang telah disusun pada awal periode akuntansi dengan menganggarkan pendapatan serta belanja untuk periode saat ini. Setelah berjalan satu periode akuntansi dan diakhir periode, antara anggaran pendapatan dan belanja apakah sudah terealisasi sesuai dengan pendapatan dan belanja. Serta bisa dilihat apakah ada kenaikan atau

penurunan di Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional dan hasilnya bisa disimpulkan Surplus atau Defisit. Jika terjadi Surplus atau Defisit, pemerintah daerah harus sudah mempunyai rencana untuk tahun anggaran berikutnya agar jika Surplus dananya tidak hanya didiamkan saja atau mungkin bisa diinvestasikan atau untuk hal lain dan jika Defisit, pemerintah juga harus bisa menangani supaya tahun anggaran berikutnya agar tidak Defisit.

Pengendalian internal dalam suatu entitas sangat diperlukan. Karena pengendalian internal mengawasi segala aktivitas didalam suatu entitas dan selalu mengontrol semua kegiatan agar sesuai dengan aturan atau standar yang berlaku dalam entitas tersebut. Begitu pula dalam Pemerintah Daerah haruslah ada pengendalian internalnya agar kinerja para aparat pemerintah daerah bisa diawasi dan aktivitasnya tidak melenceng dari semua aturan perundang – undangan yang ada. Pengendalian internal setiap bulan (atau sesuai peraturan pemerintah daerah setempat) selalu membuat laporan yang berisi tentang kinerja pemerintah daerah setiap bulannya, dalam laporan audit internal tersebut keseluruhan dirinci, tidak hanya bagian keuangannya saja, melainkan bagian yang lain didalam satu kesatuan Pemerintah Daerah tersebut.

Sistem Informasi Akuntansi diperlukan karena didalamnya memuat informasi akuntansi yang berdasarkan komputerisasi yang pada saat ini sangat dibutuhkan dalam membuat laporan keuangan, serta bisa memuat informasi secara akurat dan benar untuk semua pihak yang membutuhkan laporan keuangan tersebut. Sistem Informasi Akuntansi membantu para aparat pemerintah daerah untuk membuat laporan keuangan pemerintah daerah yang nantinya laporan keuangan tersebut akan

dilaporkan kepada pihak – pihak yang membutuhkannya, seperti pemerintah pusat, BPK (Badan Pengawas Keuangan), Inspektorat dll, untuk diketahui apakah laporan keuangan Pemerintah Daerah tersebut sudah sesuai dengan aturan – aturan yang berlaku atau belum.

Kompetensi adalah karakteristik dasar dari seseorang yang memungkinkan mereka mengeluarkan kinerja superior dalam pekerjaannya. Makna kompetensi mengandung bagian kepribadian yang mendalam dan melekat pada seseorang dengan perilaku yang dapat diprediksi pada berbagai keadaan dan tugas pekerjaan. Prediksi siapa yang berkinerja baik dan kurang baik dapat diukur dari kriteria atau standar yang digunakan. Kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu suatu organisasi (kelembagaan) atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Akuntabilitas merupakan konsep yang kompleks yang lebih sulit mewujudkannya daripada memberantas korupsi. Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal bukan hanya pertanggungjawaban vertikal.

Penelitian yang dilakukan Fikri dan Pancawati (2016) menyatakan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Peran Internal Audit memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variable Moderating. Penelitian yang dilakukan Yuliani dan Agustini (2016) menyatakan bahwa Penerapan Sistem Akuntansi

Keuangan Pemerintah Daerah dan Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah sedangkan Kompetensi SDM tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Diani (2014) yang menyatakan bahwa Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi tidak berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Penelitian yang dilakukan Setyowati (2016) menyatakan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Peran Internal Audit berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Nur dan Rahmawati (2016) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintah dan pengendalian intern tidak berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Hal inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan tujuan menganalisa pengaruh sistem informasi akuntansi dan peran internal audit terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Peneliti mengambil judul ini karena masih banyak kejadian di beberapa daerah dengan tingkat kualitas laporan keuangannya yang dapat dikatakan kurang baik. Walaupun pasti akan ada pemeriksaan yang dilakukan oleh pemerintah pusat atau jajaran yang berwenang, akan tetapi hal itu sepertinya tidak terlalu berpengaruh terhadap peningkatan prestasi aparat pemerintah daerah. Sehingga peneliti mengangkat kasus ini dengan judul "*Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Pengendalian Internal, Kompetensi SDM, dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah*

*Daerah*” dengan harapan setelah adanya penelitian ini kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah akan semakin baik setiap tahunnya dengan didukung oleh sistem informasi akuntansi dan pengendalian inernal yang baik pula di pemerintah daerah. Dengan semakin baiknya kualitas laporan pemerintah daerah tersebut maka akan menghasilkan citra yang baik pula di pemerintah daerah tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Iskandar Muda dkk (2018) menyatakan bahwa Sistem Informasi Akuntansi dan Pengendalian Internal berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan. Maka penelitian ini akan mereplikasi penelitian tersebut dengan menambahkan variable kompetensi SDM dan akuntabilitas. Penelitian yang dilakukan Yuliani dan Agustini (2016) menyatakan bahwa Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Septiningtyas (2018) menyatakan bahwa Akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan Iskandar Muda dkk (2018), Yuliani dan Agustini (2016), dan Septiningtyas (2018) karena pada penelitian ini akan menggabungkan variabel sistem informasi akuntansi, pengendalian internal, kompetensi SDM dan akuntabilitas. Penelitian ini juga memiliki perbedaan sampel, sampel yang dilakukan pada penelitian ini yaitu di Kabupaten Demak.

Tema yang diangkat pada penelitian ini juga berdasarkan beberapa pengalaman dari lingkungan sekitar yang pernah penulis ketahui sehingga penulis

tertarik untuk mengangkat tema ini sebagai penelitian pra skripsi, dengan harapan dapat membuka pandangan kita terhadap dunia pemerintahan yang ada di Indonesia saat ini.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Penelitian yang dilakukan Fikri dan Pancawati (2016) menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah, peran internal audit memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan dengan sistem pengendalian intern sebagai variable moderating. Penelitian yang dilakukan Yuliani dan Agustini (2016) menyatakan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Diani (2014) yang menyatakan bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan Setyowati (2016) menyatakan bahwa peran teknologi informasi (TI) tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan, sedangkan kompetensi sumber daya manusia dan peran internal audit berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Nur dan Rahmawati (2016) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintah dan pengendalian intern tidak berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pengaruh sistem informasi akuntansi, pengendalian internal, kompetensi SDM, dan akuntabilitas terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

### **1.3 Perntayaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pertamyaan penelitian ini adalah :

1. Bagaimana sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah?
2. Bagaimana pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah?
3. Bagaimana kompetensi SDM berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah?
4. Bagaimana akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas dengan disimpulkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis :

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengendalian internal terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kompetensi SDM terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan dapat memberikan gambaran mengenai kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah di berbagai daerah, diantaranya sebagai berikut :

1. Aspek Teori

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah pedoman atau gambaran bagi aparat pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan prestasi mereka di dalam suatu pemerintahan dan juga dapat sebagai gambaran atau tolok ukur mengenai kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

2. Aspek Prektis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan gambaran untuk para atasan di pemerintah daerah untuk dapat lebih mengawasi bawahannya agar kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah tetap terjaga dengan baik kualitasnya dan bisa dipandang baik oleh masyarakat.